

PEMAKNAAN AGAMA DALAM PARTAI POLITIK DALAM KONTEKS REFORMASI STUDI PERBANDINGAN PPP, PKB DAN PAN

Drs. H. Moh. Nurhakim, Msi.¹

ABSTRAK

Objek penelitian dibatasi pada tiga partai Islam: PPP, PKB dan PAN. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan ini penelitian ini akan dilakukan melalui dua tahap penelitian (multitahun). Pada tahap (tahun) pertama, dipergunakan penelitian kepustakaan, dan tahap (tahun) kedua dipergunakan studi kasus lapangan di kota Malang. Pada tahap pertama akan dipergunakan data-data kepustakaan seperti buku, majalah, jurnal, koran dan dokumen resmi partai. Sedangkan pada tahap kedua akan dipergunakan data-data dari hasil interview terhadap ketiga partai tersebut di Kota Malang.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan agama dalam partai politik pada konteks reformasi studi perbandingan PPP, PKB dan PAN.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan agama dalam partai politik pada konteks reformasi studi perbandingan PPP, PKB dan PAN.

Berdasarkan hasil analisis terhadap *platform* dan simbol-simbol ketiga partai Islam sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

Pertama, bahwa agama Islam yang satu ketika dimaknai dalam konteks politik di era reformasi, ternyata memunculkan makna-makna yang beragam. PPP memaknai Islam sebagai alat pemersatu bangsa dan motivator pembangunan. Sementara itu, dalam PKB Islam lebih dimaknai sebagai motivator kebangkitan bangsa. Sedangkan PAN menekankan operasionalisasi nilai-nilai Islam sebagai amanat yang harus diwujudkan dalam konteks nasional. *Kedua*, bahwa posisi agama dengan politik dalam ketiga partai berbeda-beda. Di PPP posisi agama **terintegrasikan** ke dalam politik, di mana antara keduanya tidak ada pemisahan. Secara formal agama dijadikan sebagai asas partai. Di sini politik simbol relatif berlaku, dan agama menjadi simbol serta identitas partai. Sementara itu, di PKB posisi agama **terspesialkan** dari politik. Antara keduanya terpisah tetapi masih ada koneksitas; agama tidak masuk ke dalam struktur partai; agama berfungsi sebagai landasan etik politik. Akan tetapi politik simbol sangat dominan. Di sini agama menjadi simbol dan identitas politik yang sangat efektif. Sedangkan di PAN posisi agama terpisah dengan politik, tetapi nilai-nilai agama diinternalisasikan ke dalam diri pelaku politik, kemudian **diobjektifikasikan** (dikonkritkan) ke dalam politik praktis atau program-program partai. Di sini agama sebagai landasan etik berpolitik. Politik simbol tidak berkembang sebagaimana pada PKB dan di PPP.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Ledakan partisipasi politik masyarakat di era reformasi, sebagaimana kita saksikan sekarang, membawa konsekuensi pluralisasi kehidupan politik. Salah satu indikator, lahir multipartai Islam dengan azas yang berbeda-beda dan beragam *platform*. Sebagian partai umat Islam, seperti PPP, PBB, PK, PKU, dan PNU, berazas Islam; dan, sebagian yang lain, seperti PKB dan PAN, berazas Pancasila. Tentu saja hal ini membawa visi dan aksi yang berbeda pula. Sebagian partai-partai Islam menekankan visi kebangsaan, keadilan, keumatan, amanah, keindonesiaan, demo-

kratisasi, sementara sebagian yang lain menekankan moral Islam. Dalam arti, bahwa sebagian bersikap inklusif, dan sebagian yang lain bersikap eksklusif.

Dalam kondisi masyarakat yang mengalami transisi menuju era reformasi, maka keadaan partai sebagai disinggung di atas, tak jarang menimbulkan berbagai pertanyaan dan respon yang bermacam-macam di berbagai kalangan masyarakat.

Pertama, sebagian masyarakat curiga terhadap beberapa partai Islam yang secara tegas meletakkan Islam sebagai dasar. Partai Islam dianggap sebagai partai yang hanya memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok agama tertentu dan masalah-

¹ Drs. H. Moh. Nurhakim, Msi., Staff Pengajar Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

masalah yang sangat sempit. Bahkan, mereka dihantui oleh kekhawatiran jikalau partai-partai Islam akan menjadikan Indonesia negara Islam.

Kedua, masyarakat merasa kebingungan dengan adanya gejala paradok orientasi partai-partai politik di tanah air. Di satu sisi lahir kecenderungan politik alokatif yang rasional. Namun, di sisi lain, politik aliran atau keagamaan muncul kembali lengkap dengan simbol-simbol keagamaan. Sehingga, bagi sebagian mereka, keterlibatan agama dalam pentas politik hanya akan menodai agama itu sendiri dan mencampurkan dua hal yang semestinya dibedakan atau dipisahkan. Sementara di antara sebagian masyarakat yang lain beranggapan, partai-partai agama adalah sah dan cukup relevan untuk ditawarkan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beridentitas agama Islam. Maka, isu-isu agama masih sangat mungkin untuk menarik minat calon pemilih, demikian pula penggunaan simbol-simbol keagamaan.

Uniknya partai-partai yang berbasis umat Islam, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, sama-sama menjadikan isu-isu, atribut-atribut dan simbol-simbol keagamaan sebagai cara menarik calon pemilih. Hal ini masih sering kita lihat di seputar pemilu yang lalu. Sebagai contoh, atribut bendera dan warnanya dikaitkan dengan paham-paham keagamaan tertentu; slogan-slogan dan pekik-pekik dalam kampanye menggunakan kalimat-kalimat agama; ayat-ayat al-Qur'an dan hadits saling digunakan sebagai argumen teologis-politik dan pakaian-pakaian keagamaan digunakan sebagai lambang keshalihan figur tokoh partai Islam. Padahal, jika konsisten, semestinya "politisasi" agama tidak diperlukan lagi. Demikian pula, partai-partai yang disebut terbuka semestinya mengambil jarak yang amat tegas untuk tidak menggunakan simbol-simbol keagamaan ataupun isu-isu keagamaan.

Objek penelitian dibatasi pada tiga partai Islam: PPP, PKB dan PAN. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan ini penelitian ini akan dilakukan melalui dua tahap penelitian (multitahun). Pada tahap (tahun) pertama, dipergunakan penelitian kepustakaan, dan tahap (tahun) kedua dipergunakan studi kasus di lapangan di kota Malang. Pada tahap pertama akan dipergunakan data-data kepustakaan seperti buku, majalah, jurnal, koran dan dokumen resmi partai. Sedangkan, pada tahap kedua akan dipergunakan data-data dari hasil *interview* terhadap tiga ketiga partai tersebut di Kota Malang.

1.2. Rumusan Permasalahan

Atas dasar pemikiran di atas, penelitian ini ingin menjawab dua permasalahan.

1. Bagaimana agama dimaknai dan dioperasionalkan nilai-nilainya ke dalam platform dan simbol PPP, PKB dan PAN?
2. Bagaimana perbedaan posisi agama dengan politik serta bentuk-bentuk pemaknaan agama dalam PPP, PKB dan PAN ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, penelitian ini mengetahui dua permasalahan.

1. Agama dimaknai dan dioperasionalkan nilai-nilainya ke dalam platform dan simbol PPP, PKB dan PAN.
2. Perbedaan posisi agama dengan politik serta bentuk-bentuk pemaknaan agama dalam PPP, PKB dan PAN.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada umumnya politik diartikan sebagai perjuangan demi kepentingan dan kekuasaan (Morgenthau, 1961: 27-39). Teori ini meyakini apapun yang dilakukan orang dalam kehidupan politik pada akhirnya adalah untuk meraih kekuasaan. Teori ini pada gilirannya mendorong munculnya sebuah rumusan yang pragmatis, "siapa mendapatkan apa, kapan dan di mana" (Lasswell, 1935).

Teori ini meniscayakan politik masuk ke dalam bidang obyektif yang tidak mungkin dicampur dengan unsur-unsur kepercayaan dan agama yang bersifat subyektif dan *privat*. Sebagai bidang yang obyektif politik berdimensi tunggal, yakni rasional, sementara agama berdimensi banyak (Kuntowijoyo dalam Hamid Basyaib, 1999: 4) yakni, rasional-irasional, dunia-akhirat, jasmani-rohani, dan isoteris-eksoteris, dst. Menurut teori ini, dimensi politik yang tunggal ini memperbolehkan ambisi, kekuasaan, dan tujuan-tujuan yang lain yang bersifat *profan* dan material. Adapun nilai-nilai transendental sama sekali tidak dapat dicampurkan ke dalam politik. Oleh sebab itu, menurut teori ini, semakin masyarakat modern, kehidupan politik semakin jauh dari intervensi agama atau sebaliknya, kehidupan politik tidak memanfaatkan agama.

Berbeda dengan teori pertama di atas, teori kedua memandang politik merupakan perjuangan atas nilai-

nilai dan simbol-simbol (Geertz, 1973: 193-233). Teori ini memandang politik sebagai kompetisi dan perjuangan di seputar makna simbol-simbol serta penguasaan lembaga-lembaga yang mendefinisikan dan mengartikulasikan nilai-nilai sosial. Maka, politik di sini sebagai pencipta simbol (Immanuel Wallerstein dan Max Weber, dikutip oleh Dale F. Eickelman, 1998: 20).

Nilai-nilai dan simbol-simbol yang diperjuangkan dalam politik, selanjutnya, dapat berupa nilai-nilai dan simbol-simbol apa saja bergantung masyarakat yang terlibat dalam politik. Misalnya, nilai, tradisi, budaya, agama, serta nilai-nilai luhur yang lain yang memungkinkannya sebagai identitas tertentu dari masyarakat. Jika, misalnya, masyarakat di sana adalah masyarakat religius, maka mungkin sekali nilai-nilai yang diperjuangkan adalah nilai religius itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam praktik politik, simbol-simbol yang diperjuangkan adalah simbol-simbol keagamaan. Sebab, nilai-nilai serta simbol-simbol tersebut mempunyai makna-makna yang dengan sadar diperjuangkan.

Tampaknya teori kedua ini dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk melihat dan menjelaskan fenomena tertentu dalam politik Islam. Islam memandang bahwa kehidupan ini mesti berjalan di atas nilai-nilai ilahiyah (transendental). Seorang yang beriman berkewajiban mengaktualisasikan keimanannya dalam wujud nyata. Jika seorang mukmin meyakini bahwa kebenaran datangnya dari Allah, maka ia harus memperjuangkan nilai-nilai kebenaran Ilahiyah itu ke dalam praksis kehidupan, termasuk ke dalam dunia politik. Nilai-nilai ilahiyah yang harus teraktualisasikan dalam praktik politik umat Islam semacam ini, menurut Fazlurrahman sebagaimana dikutip oleh Kuntowijoyo (1997: 1-4), merupakan epistemologi politik relasional. Di mana antara yang transendental berhubungan dengan yang *profan*.

Selanjutnya, dalam pandangan Islam politik sebagaimana dipahami dari teori pertama jelas tidak mempunyai fakta historis. Dalam Islam, baik secara historis maupun normatif politik merupakan keniscayaan. Bahkan, menurut banyak pengamat Barat, Islam merupakan satu-satunya agama yang paling tegas dan menonjol di bidang politik. Dalam Islam politik dinilai sebagai yang sah adanya.

Jadi, politik di sini didefinisikan sebagai perkara pengaturan hidup orang banyak atas dasar nilai-nilai ilahiyah demi kemaslahatan orang banyak. Definisi ini menunjukkan bahwa kata kunci politik Islam berada pada tiga hal; persoalan pengaturan, nilai-nilai

ilahiyah dan kemaslahatan orang banyak. Ketiga hal ini kesemuanya merupakan konsepsi yang sangat ideal. Oleh sebab itu, dalam pandangan Islam antara agama dan politik tidak mesti terpisah sebagaimana dinyatakan oleh teori pertama di atas. Persoalannya adalah dalam praktik perpolitikan umat Islam, pelaksanaan teori kedua ini menjadi bervariasi. Ada yang memisahkan keduanya secara tegas, ada yang tidak memisahkan sama sekali, dan ada yang memberinya posisi samar-samar. Inilah yang nanti akan dibahas.

Mengenai konsep partai Islam di sini tidak dilihat dari sudut teologis di mana partai Islam didefinisikan sebagai partai yang benar-benar berazaskan Islam dan komitmen dalam aktualisasinya. Tetapi, partai-partai Islam di sini didefinisikan secara sosiologis di mana basis konstituennya adalah umat Islam; dan adanya keterkaitan suatu partai dengan simbol-simbol serta etik agama.

Berdasarkan konsep di atas, maka dalam penelitian ini model klasifikasi partai-partai peserta Pemilu 1998 ala Kuntowijoyo dipakai. Pertama, partai yang berasaskan Islam seperti PPP, PBB, PK dan PNU; kedua, partai yang melakukan objektivikasi seperti PAN; ketiga, partai berdasar spesialisasi seperti PKB; dan keempat, partai sekular seperti PDIP dan Golkar.

Jika dikaitkan dengan agama, maka partai jenis pertama meletakkan agama sebagai ideologi; jenis kedua menjadikan agama sebagai moral yang harus diaktualisasikan dalam konteks kehidupan nyata (obyektif); sementara jenis ketiga menempatkan agama pada ruang tersendiri yang terpisah dengan ruang politik atau negara, meskipun dalam praktik tetap terjadi hubungan antarkeduanya; dan, pada jenis keempat agama dalam pengertian apapun tidak dipedulikan.

Oleh karena objek penelitian hanya partai-partai Islam, maka ketiga jenis partai yang pertama saja yang akan dipakai, sedangkan partai sekular termasuk dalam pembahasan.

Untuk mengetahui hakikat partai secara normatif dan formal seorang peneliti pertama-tama harus melihat *platform* resmi partai. *Platform* ini meliputi pandangan-pandangan dasar, tujuan, visi, misi, serta arah program-program partai. Dari *platform* inilah sebuah partai melakukan aksi-aksi nyata. *Platform* biasanya bersifat edial dan dijadikan manifesto politik. Maka, jika ingin mengetahui apa makna agama, di mana posisinya, dan sejauh mana peranannya dalam

partai politik—sebagaimana hal ini ditanyakan dalam penelitian ini secara normatif dapat melalui *platform* partai, untuk selanjutnya dikonfirmasi dengan program-program serta aksi-aksinya.

Adapun simbol partai di sini dikonsepsikan sebagai lambang yang menjadi alat komunikasi antara partai dan massa. Alat dimaksud berupa slogan, *adagium*, atribut, nama, logo, warna, bahasa lisan maupun isyarat, serta institusi-institusi. Masing-masing alat ini membawa pesan dari partai untuk dikomunikasikan kepada massa atau sebaliknya. Alat-alat ini mempunyai efektifitas yang tinggi, sebab ia dapat menyederhanakan isi pesan. Karena itu, simbolisasi politik dalam masyarakat tertentu seperti Indonesia masih sangat kuat.

Berbicara tentang simbol, partai-partai Islam sangat kaya dengan simbol. Sebab, bahasa agama, khususnya agama Semitik, adalah sebuah bahasa simbolis. Yakni, bahasa yang mengungkapkan makna melalui citra dan simbol, bahasa yang sederhana dan lugas, tetapi sangat efektif untuk mengkomunikasikan ide, itulah bahasa simbol (Ali Syari'ati, 1979: 71).

Sebagaimana diketahui bahwa simbol merupakan tanda yang menunjuk kepada nilai-nilai. Keterkaitan antara nilai, simbol dan bahasa memiliki pengaruh yang sangat kuat. "Ungkapan simbolik yang saling terjalin dan diartikulasikan melalui bahasa, merupakan sarana sosialisasi yang sekaligus dapat menciptakan suatu ikatan sosial antara individu dan kelompok, sebab peran-peran dan relasi-relasi sosial yang ada di masyarakat disampaikan melalui bahasa" (Pekonen, 1989: 132).

Demikian makna-makna sebagian simbol yang bernuansa keagamaan yang sering dipakai orang dalam kehidupan politik praktis. Selanjutnya, dalam penelitian ini melalui berbagai macam simbol di atas akan dicari makna-makna keagamaan seperti apa makna agama, di mana posisi agama, dan sejauh mana peran agama di dalam politik partai.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan batasan dan pemikiran, maka ditetapkan tiga partai Islam: PPP, PKB, dan PAN sebagai fokus penelitian ini. Oleh sebab itu, menggunakan sumber data kepustakaan (*Library Research*) yang berupa buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen resmi partai.

Dalam pengumpulan data dipergunakan metode dokumentasi, dan teknik-teknik yang lazim dipergunakan di sini. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode *content analysis* (analisa isi). Isi atau pesan teks akan dicari melalui bahasa teks, kemudian dijelaskan dan diperbandingkan konsistensinya dengan fenomena perilaku politik partai. Untuk mempertajam hasil analisa, konteks yang melatarbelakangi *platform* disusun akan dikaji, termasuk suasana politik yang berkembang berikutnya. Adapun teknik berpikir deduktif maupun induktif, sebagaimana lazimnya, dipergunakan di dalam kegiatan analisis ini.

Di dalam menganalisa simbol-simbol diupayakan menggunakan alat bantu pengetahuan budaya, agama, dan makna-makna tradisi yang berlaku di masyarakat dan dunia politik. Untuk itu pula sangat berarti bantuan teori-teori sosiologi seperti teori interaksi dan simbol.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Makna Agama dalam Partai

Melihat data *platform* dan simbol ketiga partai, diketahui bahwa Islam yang dipahami atau dijadikan landasan masing-masing partai terdapat sisi perbedaan, di samping terdapat sisi-sisi yang sama.

PPP memandang Islam sebagai *way of life*. Dalam arti bahwa Islam diyakini sebagai ajaran yang menyeluruh meliputi urusan ukhrawi dan duniawi, serta urusan rohani dan jasmani. Selanjutnya, sebagai ajaran yang menyeluruh, Islam dijadikan pedoman hidup dalam seluruh dimensinya, termasuk dimensi politik. Dalam kehidupan politik sekalipun Islam telah memberi petunjuk dan pedoman yang jelas. Karena itu misi politik Islam harus diperjuangkan lewat jalur politik yang berlandaskan pada Islam pula. Praktik politik pun haruslah merujuk pada akhlak Islam, tidak yang lain, apalagi penduduk mayoritas di Indonesia adalah orang Islam.

Pemahaman Islam semacam ini telah menjadikan Islam sebagai ajaran formal. Islam formal menghendaki semua kehidupan harus didasarkan pada ajaran dan hukum Allah. Pemahaman Islam PPP yang semacam ini terlihat pada asas partai yang secara tegas dan formal adalah Islam. Ketetapan Islam sebagai asas partai merupakan aspirasi dari massa pendukungnya. Sebagian mereka meninggalkan, atau minimal bersikap pasif terhadap partai ini jika aspirasi tersebut

tidak diwujudkan. Hal ini terlihat sekali pada perubahan azas; pertama berdiri azas Islam digunakan, setelah itu berdasarkan undang-undang kepartaian di rezim Soeharto mengharuskan azas itu berubah menjadi azas Pancasila. Tetapi sekarang kembali lagi ke azas Islam karena tuntutan pendukung partai.

Lebih jauh lagi, dalam konteks politik PPP berusaha memaknai Islam sebagai kekuatan pemersatu dan pendorong pembangunan nasional. Hal ini terlihat pada *platform* partai dan namanya: Partai Persatuan Pembangunan. Aspek persatuan diaplikasikan dalam bentuk bahwa unsur-unsur kekuatan politik Islam disatukan, baik kekuatan MI, NU, Muhammadiyah, Persis, dst. Kekuatan yang bersatu itu kemudian digunakan untuk membangun Indonesia. Inilah yang dimaksud PPP, bahwa misi politik Islam harus juga diwujudkan dalam realitas kehidupan.

PKB melihat ajaran Islam terdiri dari dua macam. Pertama, ajaran yang sifatnya formal, dan ajaran yang sifatnya etik. Formal harus dilakukan sesuai dengan apa adanya seperti bidang ritual shalat, tetapi yang etik harus diambil semangatnya sementara tentang teknik operasionalnya diserahkan kepada manusia, hal ini seperti ajaran tentang politik.

Karenanya, dalam memandang soal politik PKB menjadikan Islam sebagai landasan etik tersebut, bukan sebagai azas seperti dalam PPP. Sebagai bukti, PKB memaknai etik Islam dalam konteks politik di Indonesia pada era reformasi ini sebagai “kebangkitan” dan “kebangsaan”-seperti terlihat pada namanya. Bagi PKB Islam harus membangkitkan semangat umat yang sedang mengalami peminggiran dan ketidakadilan selama Orde Baru. Bagi PKB komitmen Islam tidak hanya kepada umat Islam saja yang terbatas, tetapi harus kepada seluruh bangsa Indonesia. Komitmen itu terlihat pada slogan, “PKB dari ulama untuk bangsa”.

Tetapi, di samping itu PKB memaknai Islam sebagai simbol yang mampu menjadi faktor integrasi dan pencetak identitas. Karenanya di antara ketiga partai ini, PKB adalah yang paling berhasil menggunakan politik simbol, di mana ia banyak menggunakan dan memanfaatkan simbol-simbol keagamaan dalam berpolitik sebagaimana telah tampak pada *platform* dan simbol partai.

Dalam soal politik PAN tampaknya lebih rasional. PAN tidak menggunakan simbol-simbol keagamaan sebagaimana PPP dan PKB. PAN lebih

tampak melakukan objektivikasi agama ke dalam partai. Dalam *platform* maupun simbol partai tidak tampak secara langsung term-term agama ditampilkan. Politik simbol tidak terlalu tampak dalam PAN.

Adapun objektivikasi tersebut terlihat pada nama partai, “Amanat Nasional”. Di sini doktrin Islam tentang amanah diambil sebagai sentral ajaran dan diobjektivikasikan ke dalam konteks nasional. Semangat Islam yang *rahmatan lil ‘alamin* dijewantahkan ke dalam semangat partai yang memberi penyinaran terhadap seluruh bangsa.

4.2. Posisi dan Bentuk-bentuk Pemaknaan Agama dalam Partai

Jika di PPP agama secara formal menjadi azas partai, di sini posisi agama berada dalam lokus politik atau partai. Artinya, agama terintegrasi dalam politik, agama dan politik tidak dipisahkan, agama mendasari, membimbing, dan mengontrol perilaku politik. Jadi agama tidak saja memberikan semangat, tetapi sampai dengan mengontrol perilaku.

Salah satu bentuk aktual posisi agama yang terintegrasi ke dalam lokus politik ini adalah perilaku politik yang tetap mengutamakan *akhlak karimah*. Misalnya, sebagai partai yang sering dianggap ekstrim di masa Orde Baru dan sering melontarkan kritik tajam, tetapi hal itu tetap tidak diizinkan dengan cara *mengolok-olok*, dengan kata-kata kasar, caci maki, atau dengan cara yang tidak etis yang menyinggung perasaan orang lain. Contoh lain, dalam *beramar ma'ruf nahi munkar* kepada pemerintah, PPP menggunakan cara kemitraaan, dialogis serta kerjasama, tidak bersikap emosional, menganggap orang lain sebagai lawan, dan berkoar-koar di hadapan publik (Metareum, 1995: 44-45).

Di samping terlihat pada azas, posisi agama yang demikian itu juga tercermin dalam program-program partai, dan usaha-usaha memperjuangkan aspirasi umat Islam berkaitan dengan perundang-undangan. Misalnya, PPP memperjuangkan RUU Peradilan Agama, RUU Pendidikan Nasional yang memperkuat posisi pendidikan agama, dst.

Dari contoh ini tampak bahwa PPP berusaha memosisikan agama sebagai sesuai yang obyektif di tengah masyarakat. Dalam arti, sebagai masyarakat yang religius, bangsa Indonesia benar-benar menghadapi persoalan obyektif yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keberagamaan dan pendidikan agama. Oleh sebab itu, dapat dikatakan PPP

memposisikan permasalahan keagamaan sebagai sesuatu yang real dan obyektif bagi masyarakat Indonesia.

Dilihat dari sisi azas Islam, memang PPP di sini seolah meletakkan agama sebagai sesuatu yang eksklusif, di mana non-muslim tidak mungkin masuk ke dalamnya. Tetapi, jika dilihat dari segi lain, yakni upaya PPP melakukan objektivikasi program, maka siapapun dan apapun agamanya tidak ada alasan untuk menolaknya, khususnya program-program yang bersifat nasional. Misalnya, program antidiskriminasi, ekonomi demokrasi dan kerakyatan, program Kredit Usaha Tani, perlindungan buruh, dst.

Bagaimana dengan posisi agama dalam PKB. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dalam PKB, Islam dijadikan sebagai motivasi dalam berpolitik, dan perilaku politik pun harus di semangati dan diwarnai oleh nilai-nilai etik Islam. Hanya saja, dalam berpolitik PKB tidak memasukkan ajaran-ajaran agama sebagai aspirasi yang diperjuangkan masuk ke dalam struktur negara. Kata lain, pemahaman Islam yang substantif dari PKB itu pada gilirannya mencoba memposisikan Islam sebagai landasan etik, tetapi tidak memasukkannya ke dalam struktur negara.

Oleh sebab itu, posisi agama terpisah sama sekali dengan politik. Posisi agama secara formal dan tegas berada di luar lokus politik. Namun demikian, menurut Kuntowijoyo, PKB tidak dapat dipersamakan dengan partai sekular seperti PDIP dan Golkar. PKB hanya mencoba menspasialkan politik dari agama. Dalam arti, agama diposisikan di luar struktur politik, tetapi secara fungsional tetap terjadi koneksitas antarkeduanya. Bentuk koneksitas itu, misalnya, agama dijadikan landasan etik politik, politik simbol (simbol-simbol agama) dipakai dan dimanfaatkan, bahkan potensi-potensi agama yang lain banyak yang dipergunakan.

Melihat posisi agama yang spasial dengan politik ini, sepiantas memperlihatkan PKB tidak konsisten. Secara formal menolak agama sebagai asas Partai, tetapi secara fungsional terdapat koneksitas antara keduanya. Bahkan, bentuk koneksitas itu secara terang-terangan ditunjukkan dalam penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam partai yang sangat dominan. Diperkirakan, tanpa politik simbol ini, PKB kurang mendapat dukungan yang signifikan.

Kesan ketidakkonsistenan ini terlihat pula antara sikap dan pandangan sang deklarator, Abdurrahman Wahid dengan realitas massa pendukung PKB. Abdurrahman Wahid menghendaki spasialisasi tegas

atau bahkan "sekularisasi", tetapi umumnya massa bahkan elit ulama tidak dapat membedakan antara keduanya, bahkan cenderung "mempolitisir agama". Fenomena ketegangan bahkan konflik antarwarga NU yang mendukung PPP dan yang mendukung PKB disebabkan salah satunya karena ketidakkonsistenan atau ketidakjelasan posisi agama dengan politik di sini. Sekularkah, spasialkah, atau terintegrasi.

Sekarang bagaimana posisi agama dalam PAN. Seperti dijelaskan di atas, PAN memaknai agama secara substantif, yakni dalam kaitan dengan politik, agama sebagai landasan etik partai. Pemaknaan agama seperti ini pada gilirannya membawa agama dalam PAN pada posisi di luar dan terpisah secara formal dari politik. Keterpisahan ini, menurut Kuntowijoyo, tidak harus disamakan dengan posisi terpisahnya agama dengan politik dalam PDIP ataupun Golkar-yang berarti tidak mempedulikan agama sama sekali, tetapi di sini posisi agama terobjektifkan ke dalam realitas politik praktis. Maksudnya, bahwa kesadaran etik agama dan nilai-nilai agama tertentu diinternalisasikan ke dalam pelaku politik, kemudian diaktualkan secara konkrit dalam program serta aksi-aksi partai sehingga tampak bahwa program dan aksi tersebut menjadi kesadaran bersama. Orang non-muslimpun kemudian merasakan dan menerimanya secara alami, bukan sebagai program keagamaan (Kuntowijoyo, 1997: 66-68).

Praktik objektivikasi ini terlihat baik dalam *platform*, simbol, maupun program Partai. Dalam *platform* misalnya, disebutkan secara tegas bahwa cita-cita partai ini berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan (Musa Kazim, 1999: 48). Inti kemanusiaan dan kemajemukan adalah umum dan karenanya dapat diterima oleh siapapun. Selanjutnya, dalam program partai aspek kemanusiaan itu terelaborasi menjadi lebih konkrit, yaitu, sebagai contoh, menolak diskriminasi etnik, menolak pembatasan hak-hak kaum minoritas etnik China, meningkatkan keterwakilan perempuan di segala lapangan, dst. (Ibid: 50-56).

Adapun politik simbol keagamaan dalam PAN relatif tidak dominan sebagaimana dalam PKB dan PPP. Sebagai partai yang memandang politik secara obyektif dan rasional, tentu simbolisasi agama dalam politik sangat kurang. Hal ini wajar, karena sesungguhnya komunikasi politik sangat sulit diwujudkan melalui simbol-simbol tradisional sebagaimana di kalangan pendukung PKB jika masyarakat pendukung

PAN terdiri dari masyarakat rasional. Karenanya, ketegasan dan kejelasan *platform*, serta kecanggihan program Partai akan lebih menarik bagi para calon pendukung PAN atau para partisipannya.

Meskipun sejak semula PAN mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka, dan hal itu telah benar-benar dibuktikan dalam *platform* serta komposisi pengurus teras PAN tingkat pusat, namun hal tersebut tidak terlalu dapat dilihat pada kasus-kasus pengurus di daerah-daerah. Pengurus di daerah-daerah umumnya homogen dan terdiri dari warga Muslim serta Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa cita-cita PAN sebagai partai terbuka dalam realitas tingkat bawah masih sulit diwujudkan. Akan lebih sulit lagi jika kalimat "takwa" sebagaimana yang diusulkan oleh A.M. Fatwa dan ditentang oleh Faisal Basri itu, dimasukkan ke dalam *platform* PAN yang baru nanti.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap *platform* dan simbol-simbol ketiga partai Islam sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, bahwa agama Islam yang satu ketika dimaknai dalam konteks politik di era reformasi, ternyata memunculkan makna-makna yang beragam. PPP memaknai Islam sebagai alat pemersatu bangsa dan motivator pembangunan. Sementara itu, dalam PKB Islam lebih dimaknai sebagai motivator kebangkitan bangsa. Sedangkan PAN menekankan operasionalisasi nilai-nilai Islam sebagai amanat yang harus diwujudkan dalam konteks nasional.

Kedua, bahwa posisi agama dengan politik dalam ketiga partai berbeda-beda. Di PPP posisi agama **terintegrasikan** ke dalam politik, di mana antara keduanya tidak ada pemisahan. Secara formal agama dijadikan sebagai azas partai. Di sini politik simbol relatif berlaku, dan agama menjadi simbol serta identitas partai. Sementara itu, di PKB posisi agama **terspialkan** dari politik. Antara keduanya terpisah tetapi masih ada koneksitas, agama tidak masuk ke dalam struktur partai, agama berfungsi sebagai landasan etik politik. Akan tetapi politik simbol sangat dominan. Di sini agama menjadi simbol dan identitas politik yang sangat efektif. Sedangkan di PAN posisi agama terpisah dengan politik, tetapi nilai-nilai agama diinternalisasikan ke dalam diri pelaku politik,

kemudian **diobjektivisasikan** (dikonkritkan) ke dalam politik praktis atau program-program partai. Di sini agama sebagai landasan etik berpolitik. Politik simbol tidak berkembang sebagaimana pada PKB dan di PPP.

Maka, secara umum dapat dikatakan bahwa partai-partai Islam di era reformasi masih menggunakan politik simbol, di mana agama dijadikan simbol dan identitas partai. Bahkan, dalam beberapa kasus agama dipolitisir. Tetapi hal ini semakin lama semakin memudar dan tidak signifikan. Perolehan suara pada dua pemilu terakhir membuktikan simpulan ini.

Implikasinya, partai-partai yang selalu menggunakan isu atau simbol-simbol keagamaan terbukti semakin tidak menarik bagi masyarakat pada umumnya. Memang, sentimen keagamaan dapat dipergunakan dalam batas-batas minimal, namun berdasarkan kasus pemilu yang lalu semakin menunjukkan bahwa pemaknaan agama ke dalam partai politik yang bersifat substantif dan obyektif lebih menarik.

5.2. Saran

Karenanya, di sini disarankan kepada pelaku politik agar ke depan politik simbol dikurangi, dan politik yang rasional lebih dikembangkan. Selanjutnya, pendidikan politik bagi massa pendukung partai Islam hendaknya menjadi agenda prioritas agar mereka tidak terjebak ke dalam simbol-simbol yang semu. Bagi elit politik hendaknya tidak memanfaatkan kondisi masyarakat yang masih awam politik itu untuk keperluan politik yang mengatasnamakan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Muhammad., 1997. *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat* Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Basyaib, Hamid, ed., 1999. *Mengapa Partai Islam Kalah*. AlVabet. Jakarta.
- Casanova, Jose., 1994. *Public Religions in the Modern World*, the University of Chicago Press. USA.
- Eickelman, Dale F., 1998. *Ekspresi Politik Muslim*. Mizan. Bandung.
- Hasan, Sahar, ed., 1998. *Memilih Partai Islam, Visi, Misi, dan Persepsi*. GIP. Jakarta.
- Heelas, Paul., 1996. *The New Age Movement, The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity*. Blackwell Publication. USA.
- Hefner, Robert W., 1998. *Democratic Civility, The History of Cross-Cultural Possibility of a Mod-*

- ern Political Ideal. Transaction Publication. USA.
- Hidayat, Komaruddin., 1996. Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik. Paramadina. Jakarta.
- _____, 1997. Islam in an Era of Nation States, Politics and Renewal in Muslim Southeast Asia. University of Hawaii Press. Honolulu.
- Jansen, Johannes J.G., 1997. The Dual Nature of Islamic Fundamentalism, Hurst & Company. London.
- Juergensmeyer, Mark., 1998. Menentang Negara Sekular Kebangkitan Global Nasionalisme Religius. Mizan. Jakarta.
- Kazhim, Musa, ed., 1999. 5 Partai dalam Timbangan PAN, PBB, PDIP, PKB, PPP. Pustaka Hidayah. Jakarta.
- Kuntowijoyo., 1997. Identitas Politik Umat Islam. Mizan. Jakarta.
- Lewis, Bernard., 1994. The Policial Languages of Islam, terj. Gramedia. Jakarta.
- Madjid, Nurcholish., 1999. Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi. Paramadina. Jakarta.
- Metareum, Ismail Hasan., 1995. Akhlakul Karimah dalam Berpolitik. Pustaka Panjimas. Jakarta.
- Mul Khan, Abdul Munir., 1989. Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987. Rajawali Press. Jakarta.